

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk mendeskripsikan mengenai perbedaan pengaturan regulasi pada transaksi *repurchase agreement* yang diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Beralihnya Bapepam-LK menjadi OJK tidak menghapuskan pengaturan repo yang telah berlaku sebelumnya, sehingga kedua regulasi ini masih eksis diberlakukan hingga saat ini, tetapi memiliki perbedaan dalam teknis pengaturannya yang tentu akan memberi dampak untuk para pelaku transaksi *repurchase agreement* di pasar modal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan cara pengumpulan data menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan, setelah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Setelah dikumpulkan, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni membahas mengenai inkonsistensi pasal-pasal dalam regulasi transaksi repo yang diatur melalui Bapepam-LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Timbulnya disharmonisasi aturan hukum diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga memberikan dampak negatif untuk para pelaku transaksi repo di dalam pasar modal. Solusi yang harus dilakukan agar disharmonisasi peraturan perundang-undang tidak terus terjadi salah satunya dengan melakukan pengharmonisasian aturan hukum satu dengan yang lainnya sehingga bisa memberi kepastian hukum untuk para pelaku transaksi repo di pasar modal.

Kata kunci : Kepastian Hukum; *Repurchase Agreement*; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Abstract

The purpose of writing this scientific article is to describe the different regulatory arrangements on repurchase agreement transactions regulated through the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulations and Financial Services Authority Regulations. The transfer of Bapepam-LK to OJK does not abolish the repo arrangement that has been in effect previously, so these two regulations still exist to this day, but have differences in their technical arrangements which will certainly have an impact on repurchase agreement transaction actors in the capital market. The type of research used in this research is normative juridical with a

statutory approach and a conceptual approach, by collecting data using secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials through library research, after collecting it will be analyzed qualitatively. Once collected, it will be analyzed qualitatively. The results of this study discuss the inconsistencies of the articles in the repo transaction regulations regulated through Bapepam-LK and the Financial Services Authority Regulations. The emergence of disharmony of the rule of law is caused by several influencing factors that have a negative impact on repo transaction actors in the capital market. One solution that must be done so that the disharmony of laws and regulations does not continue to occur is one of them by harmonizing the legal rules with one another so that they can provide legal certainty for repo transaction actors in the capital market.

Keywords : Legal Certainty; Repurchase Agreement; Financial Services Authority Regulations; Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency